



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**KECAMATAN BULU  
KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	x
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	x
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	x
1.4 Landasan Hukum.....	x
1.5 Sistematika .....	x
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis.....	x
2.2 Rencana Kinerja .....	x
2.3 Perjanjian Kinerja.....	x
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	x
3.2 Realisasi Anggaran .....	x
<b>BAB IVPENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	x
4.2 Rekomendasi .....	x
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja .....	x
RKT / Lain-lain yang dianggap perlu .....	x

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x : Capaian Kinerja.....	x
Tabel x.x : Realisasi Capaian Kinerja.....	x
Tabel x.x : Capaian Kinerja Keuangan.....	x

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan ... ..	x
--	---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Kantor Kecamatan Bulu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan Bulu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, Januari 2023

Camat Bulu

  
Mochamad Soleh SE MM

Pembina

NIP. 19700505 199003 1008

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan serta peran masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul di waktu pelaksanaan.

Setelah dilaksanakan maka dibutuhkan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan untuk dapat diperbaiki agar menjadi lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

#### **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten  
Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ken.asama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipian di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan ;
- e. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasiandanketatalaiksanaun, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan , kerumahtangga, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan; peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha; pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
- b. sinkronisasi program kelja dan kegiatan pemberdayan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan;
- c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- e. fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
- f. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- i. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- e. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- g. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta Penetapan dan penegasan batas desa
- m. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republi Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- f. fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- i. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
- j. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- k. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

### **1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama**

Menguraikan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Pelayanan Publik (Paten Kecamatan) Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Bulu Tingkat Kemiskinan Masih Tingginya angka kemiskinan Ketentraman dan Ketertiban Umum Reformasi Birokrasi Masih rendahnya nilai SAKIP Kemandirian Desa Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah

### **1.4 Landasan Hukum**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

### **1.5 Sistematika**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang .....
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama .....
- 1.4 Landasan Hukum .....
- 1.5 Sistematika .....

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis .....
- 2.2 Rencana Kinerja .....
- 2.3 Perjanjian Kinerja .....

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....
- 3.2 Realisasi Anggaran .....

#### **BAB IV PENUTUP**

- 6.1 Kesimpulan ..... x
- 6.2 Rekomendasi ..... x

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

##### **2.1.1 Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhirperiode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arahpembangunan atau kondisi masa depan daerah yangingindicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional kedalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi sertaisu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah: **“REMBANG GEMILANG 2026”**

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut: **Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangatmewujudkanmasyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melaluipembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tenang dalamkehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik danmendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatanyangberkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasayang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, **gampIL** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomiwarganya untuk mencapai terwujudnya masyarakatyangsehat,terdidik,memilikikemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupansosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia danpenanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsipgampil atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukungpeningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yangtransparan, terukur dan akuntabel.

##### **2.1.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakandilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktorlingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagaiberikut:

**1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.**

Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahandaerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukanpeningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

**2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.**

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahansertamenjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatanyang bermutu, adil dan merata.

**3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhanberkualitas dan berkeadilan.**

Pemerintah Kabupaten Rembang berkominten untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

**4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.**

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untukmewujudkanpeningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaanKeuangan Desa dan peningkatan Pendapatan Desa.

**2.1.3 Tujuan dan sasaran**

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasai dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari Misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut dalam konteks Kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Guna mendukung pencapaian Sasaran dan lindikator tersebut, maka Kecamatan memiliki program dan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik dengan indikator Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Dana Desa/Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat dan Jumlah desa dengan swadaya masyarakat  $\geq$  Rp 20.000.000,00
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tujuan jangka yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah :

**“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”**

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Bulu yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangkamenengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bulu selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

**“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.**

Tujuan dan sasaran Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat	75	79	80	81	82

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra

No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik/IPP	angka	3.2
		1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	79

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	<b>Tujuan :</b>		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2
	<b>Sasaran :</b>		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	<b>Sasaran Strategis</b>		
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	70 - 80
2	Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7 nilai
3	Meningkatnya Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	7 nilai
4	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 nilai
5	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	7 nilai
6	Meningkatnya Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan baik	% Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	7 nilai

Tabel Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu</b>	<b>64</b>	Rp 11.100.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	Rp 7.400.000
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	23	Rp 3.700.000
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15	Rp 1.561.019.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	Rp 1.489.169.000
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	95	Rp 68.850.000
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	6	Rp 3.000.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6	Rp -
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik</i>	6	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Rp -
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	6	Rp -
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	6	Rp 68.397.775
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	Rp 1.000.010
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6	Rp 2.000.000
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6	Rp 36.718.000

	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	6	Rp 4.879.765
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6	Rp 2.000.000
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	6	Rp 12.000.000
	<i>Penyediaan Bahan/ Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan</i>	6	Rp 9.800.000
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	72	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</i>		Rp -
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik</i>	1	Rp 164.600.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100	Rp 1.500.000
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6	Rp 11.500.000
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	Rp 151.600.000
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	6	Rp 21.474.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik</i>	97	Rp 10.354.000
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	84	Rp 8.120.000
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	3	Rp 3.000.000
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>	48	



		<i>Dipelihara/ Direhabilitasi</i>		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat</b>	<b>100</b>	Rp -
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp -
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	6	Rp 61.300.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	Rp 61.300.000
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	6	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100</b>	
		<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat <math>\geq</math> Rp. 20.000.000,-</b>	<b>12</b>	Rp 53.100.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100	Rp 53.100.000
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	16	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100</b>	Rp 60.818.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100	Rp 60.818.000
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional</i>	6	

		<i>Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>100</b>	Rp 10.625.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Rp 10.625.000
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	425	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	<b>95</b>	Rp 34.350.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	100	Rp 26.850.000
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	96	Rp 7.500.000
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

Proporsi Belanja OPD Kecamatan Bulu Tahun Anggaran 2022 untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal masing-masing sebesar **Rp. 2.046.783.775,-** atau 100,00 % untuk Belanja Operasi dan **Rp. 0,-** untuk Belanja Modal.

Dan secara rinci proporsi Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.046.783.775,-** yang terdiri Belanja Pegawai sebesar **Rp. 1.557.929.000,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 488.854.775,-**

Sedangkan untuk Modal sebesar Rp. **0,-**

Sisa anggaran antara anggaran yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan DPA dan DPPA OPD Kecamatan Bulu Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.046.783.775,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **1.928.692.751,-** atau sebesar 94,23 % dan sisa anggaran adalah sebesar **Rp. 118.091.024,-** atau 5,77 %.

Sisa tersebut terdiri dari sisa Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dari anggaran yang ditetapkan **Rp. 1.557.929.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.479.356.605,-** atau 94,96 % dan sisa anggaran sebesar **Rp. 78.572.395,-** atau 5,04 %.

Dan sisa Belanja Barang dan Jasa dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 488.854.775,-** terealisasi sebesar **Rp. 449.336.146,-** atau 91,92 % dan sisa anggaran Belanja Langsung **Rp. 13.584.452,-** atau 8,08 %.

Sisa kelebihan anggaran tersebut terjadi setelah dilaksanakan realisasi anggaran secara maksimal.

Realisasi Anggaran Belanja yang tidak terserap secara optimal disebabkan dari berbagai hal, antara lain :

- \* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 7.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.499.990,- atau 73,65 % sisa sebesar Rp. 1.950.010,- atau 26,35 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan 1 (satu) Tahun Anggaran.
- \* Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.669.830.000,- atau 99,99 % sisa sebesar Rp170,- atau 0,01 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan 1 (satu) Tahun Anggaran.
- \* Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.489.169.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.411.136.605,- atau 94,76 % sisa sebesar Rp. 78.032.395,- atau 5,24 %.

Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan 1 (satu) Tahun Anggaran.

- \* Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 68.850.000,- terealisasi sebesar

Rp. 68.309.760,- atau 99,22 % sisa sebesar Rp. 540.240,- atau 0,78 %. Sisa tersebut terjadi karena SK Pengurus Barang terbit per bulan Februari sehingga Honorarium Pengurus Barang di bulan Januari tidak dapat dicairkan.

- \* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.999.820,- atau 99,99 % sisa sebesar Rp. 180,- atau 0,01 %.

Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- \* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 999.780,- atau 99,98 % sisa sebesar Rp. 220,- atau 0,02 %.

Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- \* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.999.810,- atau 99,99 % sisa sebesar Rp. 190,- atau 0,01 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- \* Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang ditetapkan sebesar Rp. 36.718.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.468.000,- atau 96,60 %, sisa sebesar Rp. 1.250.000,- atau 3,40 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- \* Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang ditetapkan sebesar Rp. 4.879.765,- terealisasi sebesar Rp. 4.879.710,- atau 99,99 % sisa sebesar Rp. 55,- atau 0,01 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- \* Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.680.000,- atau 84 %, sisa sebesar Rp. 320.000,- atau 16 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- \* Penyediaan Bahan/Material yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.931.540,- atau 99,43 %, sisa sebesar Rp. 68.460,- atau 0,57 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- \* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD dari yang ditetapkan sebesar Rp. 9.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.775.000,- atau 89,54 % sisa sebesar Rp. 1.025.000,- atau 10,46 %

Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan di lapangan.

- \* Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %.

- \* Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari yang ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.120.000,- atau 74,67 % sisa sebesar

Rp. 380.000,- atau 25,33 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- \* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari yang ditetapkan sebesar Rp. 11.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.938.276,- atau 77,72 % sisa sebesar Rp. 2.561.724,- atau 22,28 %. Sisa tersebut terjadi setelah kebutuhan akan langganan Air dan langganan Listrik tercukupi selama 12 bulan.
- \* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari yang ditetapkan sebesar Rp. 151.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 141.144.930,- atau 93,10 % sisa sebesar Rp. 10.455.070,- atau 6,90 %. Sisa tersebut terjadi setelah kebutuhan selama 1 Tahun Anggaran tercukupi secara penuh.
- \* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari yang ditetapkan sebesar Rp. 10.354.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.534.400,- atau 72,77 % sisa sebesar Rp. 2.819.600,- atau 27,23 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.
- \* Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari yang ditetapkan sebesar Rp. 8.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.120.000,- atau 100,00 %.
- \* Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.704.860,- atau 56,83 %, sisa sebesar Rp. 1.295.140,- atau 43,17 %.

Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor selama 1 Tahun Anggaran.

- \* Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari yang ditetapkan sebesar Rp. 61.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.658.050,- atau 84,27 % sisa sebesar Rp. 9.641.950,- atau 15,73 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.
- \* Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dari yang ditetapkan sebesar Rp. 53.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.099.710,- atau 94,35 % sisa Rp. 3.000.290,- atau 5,65 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.
- \* Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dari yang ditetapkan sebesar Rp. 60.818.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.017.820,- atau 98,68 % sisa Rp. 800.180,- atau 1,32 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.
- \* Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara dari yang ditetapkan sebesar Rp. 10.625.000,- terealisasi sebesar Rp.

10.624.890,- atau 99,99 % sisa sebesar Rp. 110,- atau 0,01 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

\* Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dari yang ditetapkan sebesar Rp. 26.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.900.000,- atau 85,29 % sisa Rp. 3.950.000,- atau 14,71 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

\* Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari yang ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.499.970,- atau 100,00 % sisa Rp. 30,-. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

## **B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Meskipun secara keseluruhan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kantor Kecamatan Bulu pada Tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dalam pencapaian kinerja pada pelaksanaan Program dan Kegiatan sudah secara optimal dilaksanakan.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa hal yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian kinerja pengelolaan Keuangan maupun kinerja pencapaian target Program/Kegiatan adalah keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang khususnya untuk OPD Kecamatan Bulu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian OPD Kecamatan Bulu telah berusaha semaksimal mungkin dengan adanya hambatan dan keterbatasan tersebut.

Adapun beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2022 antara lain :

1. Belum terkoordinasinya secara maksimal beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya koordinasi intern OPD kami dalam melaksanakan tahapan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.
4. Masih adanya dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa pada semua tatanan kehidupan demikian juga berdampak pada Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 pada OPD Kantor Kecamatan Bulu pada khususnya dan semua OPD se Kabupaten Rembang.

Dalam pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 seperti yang diuraikan diatas secara keseluruhan dari 6 (enam) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan yang telah dilaksanakan SKPD Kecamatan Bulu yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (setelah Perubahan) sebesar **Rp. 2.046.783.775,-** (Dua milyar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 Anggaran tersebut

terrealisasi sebesar **Rp. 1.928.692.751,-** (Satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) atau dalam persentase sebesar **94,23 %**.

Skala nilai peringkat kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : >100%;
- b. Baik : 85 – 100%;**
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (contoh tabel)

N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	<b>61,5</b>	<b>61,51</b>	<b>100,02</b>	B	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	90	<b>100,00</b>	B	
3	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2	2	<b>100,00</b>	B	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7	7	<b>100,00</b>	B	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	<b>100,00</b>	B	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16	192	<b>1.200,00</b>	B	
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12	12	<b>100,00</b>	B	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	1	<b>100,00</b>	B	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik</i>		-	-	C	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	-	-	C	
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan</i>	100	-	-	C	

		<i>Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>					
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	100	-	-		C
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</i>	100	100	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	9	<b>75,00</b>		C
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</i>			-		C
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik</i>	100		-		C
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100	100	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik</i>	93	93	<b>100,00</b>		B
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan</i>	14	14	<b>100,00</b>		B



	<i>Jabatan</i>	<i>dibayarkan Pajaknya</i>					
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3	3	<b>100,00</b>		B
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8	8	<b>100,00</b>		B
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100,00</b>		B
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		C
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12		-		C
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	<b>100,00</b>		B
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12	12	<b>100,00</b>		B
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>		B
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-	<b>16</b>		-		C
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100		-		C
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	6	6	<b>100,00</b>		B
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>		B
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100	100	<b>100,00</b>		B
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil</i>	12	12			B

	<i>Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			<b>100,00</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	<b>100</b>		-		C
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100		-		C
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	80	80	<b>100,00</b>		B
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100,00</b>		B
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	94	94	<b>100,00</b>		B
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	2	2	<b>100,00</b>		B
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1	1	<b>100,00</b>		B

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	202n-2			202n-1			202n		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu					61		61,5	61,5	100,02
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat					100		90	90	<b>100,00</b>

		Daerah									
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					2		2	2	<b>100,00</b>
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					7		7	7	<b>100,00</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik					100		100	100	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					16		16	192	<b>1.200,00</b>
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					1		1	1	<b>100,00</b>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik</i>					-		-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					-		100	-	-
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>					-		100	-	-
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>					-		100	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum					100		100	100	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan</i>					12		12	12	<b>100,00</b>

		<i>Perundang-Undangan yang Disediakan</i>									
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					12		12	9	<b>75,00</b>
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</i>					100				-
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik</i>					1		100		-
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>					100		100	100	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>					12		12	12	<b>100,00</b>
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik</i>					100		93	93	<b>100,00</b>
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>					14		14	14	<b>100,00</b>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>					3		3	3	<b>100,00</b>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>					8		8	8	<b>100,00</b>
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat</i>					100		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100,00</b>
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>					100				-

	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>					12		12		-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani					100		100	100	100,00
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>					12		12	12	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat					100		100	100	100,00
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-					16		16		-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola					100		100		-
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>					6		6	6	100,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum					100		100	100	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum					100		100	100	100,00
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>					12		12	12	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100		100		-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan					100		100		-

	sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum									
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>					80		80	80	<b>100,00</b>
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik					100		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100,00</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa					100		94	94	<b>100,00</b>
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>					2		2	2	<b>100,00</b>
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>					1		1	1	<b>100,00</b>

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	3
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	0
	<i>Penyusunan Dokumen</i>	<i>Jumlah Dokumen</i>	2	3	1

	<i>Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan Perangkat Daerah</i>			
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7	10	3
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</i>	100	100	0
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16	20	4
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12	12	0
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4	5	1
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik</i>	-		
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	-		
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	-		
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	-		
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</i>	100	100	0
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	12	0

	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	12	0
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</i>	100	100	0
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik</i>	1	1	0
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100	100	0
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik</i>	100	100	0
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang</i>	14	20	6



	<i>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>			
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3	3	0
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8	10	2
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat</b>	100	<b>100</b>	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	0
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12	12	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	0
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12	12	0
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	100	<b>100</b>	0
		<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat <math>\geq</math> Rp. 20.000.000,-</b>	16	<b>16</b>	0

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100	100	0
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	6	6	0
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	100	<b>100</b>	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100	100	0
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12	12	0
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	100	<b>100</b>	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	0
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang</i>	80	100	20

	<i>Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>			
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	100	<b>100</b>	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	100	100	
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	2	3	1
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1	1	0

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu</b>	61.00	61.02	102	Penambahan tenaga di kecamatan bulu	Evaluasi ulang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.100.000	Rp 9.149.820	82,43		Evaluasi ulang
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Rp 7.400.000	Rp 5.449.990	73,65	Jabatan Tidak Terisi	Evaluasi ulang
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp 3.700.000	Rp 3.669.830	99,18	sudah dilaksanakan	Evaluasi ulang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	Rp 1.561.019.000	Rp 1.479.356.605	94,77		Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Rp 1.489.169.000	Rp 1.411.136.605	94,76	sesuai dengan penggajian	Evaluasi ulang
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Rp 68.850.000	Rp 68.220.000	99,08	sesuai dengan penggajian	Evaluasi ulang
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil</i>	Rp 3.000.000	Rp 2.999.820	99,99	sesuai standarisasi	Evaluasi ulang

		<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik</i>	Rp -			tidak dianggarkan	Evaluasi ulang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					Evaluasi ulang
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Rp -			tidak dianggarkan	Evaluasi ulang
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	Rp -			tidak dianggarkan	Evaluasi ulang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Rp 68.397.775	Rp 65.733.840	96,11		Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Rp 1.000.010	Rp 999.780	99,98	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Rp 2.000.000	Rp 1.999.810	99,99	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Rp 36.718.000	Rp 35.468.000	96,60	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang

	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Rp 4.879.765	Rp 4.879.710	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Rp 2.000.000	Rp 1.680.000	84,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	Rp 12.000.000	Rp 11.931.540	99,43	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Rp 9.800.000	Rp 8.775.000	89,54	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</i>					Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Rp 164.600.000	Rp 151.203.206	91,86		Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Rp 1.500.000	Rp 1.120.000	74,67	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Rp 11.500.000	Rp 8.938.276	77,72	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum</i>	Rp 151.600.000	Rp 141.144.930	93,10	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang

		<i>Kantor yang Disediakan</i>					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik	Rp 21.474.000	Rp 17.359.260	80,84		Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Rp 10.354.000	Rp 7.534.400	72,77	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Rp 8.120.000	Rp 8.120.000	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Rp 3.000.000	Rp 1.704.860	56,83	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat</b>					Evaluasi ulang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp -			tidak dianggarkan	Evaluasi ulang
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas</i>	Rp -			tidak dianggarkan	Evaluasi ulang

	<i>Wilayah Kecamatan</i>	<i>Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	Rp 61.300.000	Rp 51.658.050	84,27		Evaluasi ulang
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Rp 61.300.000	Rp 51.658.050	84,27	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>					Evaluasi ulang
		<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>					Evaluasi ulang
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	Rp 53.100.000	Rp 50.099.710	94,35		Evaluasi ulang
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di</i>	Rp 53.100.000	Rp 50.099.710	94,35	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang



		<i>Wilayah Kecamatan</i>					
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>					Evaluasi ulang
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	Rp 60.818.000	Rp 60.017.820	98,68		Evaluasi ulang
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Rp 60.818.000	Rp 60.017.820	98,68	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>					Evaluasi ulang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 10.625.000	Rp 10.624.890	100,00		Evaluasi ulang
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan</i>	Rp 10.625.000	Rp 10.624.890	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang

	<i>Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>					
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>					Evaluasi ulang
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Rp 34.350.000	Rp 30.399.970	88,50	Sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Rp 26.850.000	Rp 22.900.000	85,29	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	Rp 7.500.000	Rp 7.499.970	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang

(bila ada misal yang lebih dari 100% ataupun kurang dari 70% capaiannya)

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>61,5</b>	<b>61,51</b>	<b>100,02</b>	<b>1.826.590.775</b>	<b>1.263.573.114,00</b>	<b>69,18</b>	31
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	24,77	27,52	11.100.000	2.749.990,00	24,77	75
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2	1,00	50,00	7.400.000	2.749.990,00	37,16	63
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7	-	-	3.700.000	-	-	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	72,08	72,08	1.561.019.000	1.125.264.472,00	72,09	28
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16	144,00	900,00	1.489.169.000	1.076.874.892,00	72,31	28
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12	1,00	8,33	68.850.000	45.389.760,00	65,93	34
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	1,00	100,00	3.000.000	2.999.820,00	99,99	0

	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		-		-	-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	-	-	-	-		
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	100	-	-	-	-		
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	100	-	-	-	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	49,64	49,64	68.397.775	33.951.130,00	49,64	50
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	12	1,00	8,33	1.000.010	514.700,00	51,47	49
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	12	1,00	8,33	2.000.000	674.800,00	33,74	66
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	12	1,00	8,33	36.718.000	17.050.000,00	46,43	54
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	12	1,00	8,33	4.879.765	2.084.940,00	42,73	57
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	12	1,00	8,33	2.000.000	1.120.000,00	56,00	44
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	12	1,00	8,33	12.000.000	8.006.690,00	66,72	33
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	6,00	50,00	9.800.000	4.500.000,00	45,92	54
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		-		-	-		

	Daerah							
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100	-	-	-	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	52,58	52,58	164.600.000	86.543.262,00	52,58	47
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	1,00	8,33	1.500.000	1.000.000,00	66,67	33
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12	2,00	16,67	11.500.000	6.108.332,00	53,12	47
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	12	1,00	8,33	151.600.000	79.434.930,00	52,40	48
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93	70,15	75,43	21.474.000	15.064.260,00	70,15	30
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	14	7,00	50,00	10.354.000	5.239.400,00	50,60	49
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	3	3,00	100,00	8.120.000	8.120.000,00	100,00	0
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	8	5,00	62,50	3.000.000	1.704.860,00	56,83	43
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>95</b>	<b>30,26</b>	<b>31,85</b>	<b>61.300.000</b>	<b>18.547.100,00</b>	<b>30,26</b>	<b>70</b>

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-		-	-		
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12	-	-	-	-		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	30,26	30,26	61.300.000	18.547.100,00	30,26	70
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12	1,00	8,33	61.300.000	18.547.100,00	30,26	70
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>69,49</b>	<b>69,49</b>	<b>53.100.000</b>	<b>36.899.710,00</b>	<b>69,49</b>	<b>31</b>
		<b>16</b>	-	-		-		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	69,49	69,49	53.100.000	36.899.710,00	69,49	31
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	6	5,00	83,33	53.100.000	36.899.710,00	69,49	31
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>49,11</b>	<b>49,11</b>	<b>60.818.000</b>	<b>29.867.820,00</b>	<b>49,11</b>	<b>51</b>

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	49,11	49,11	60.818.000	29.867.820,00	49,11	51
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12	1,00	8,33	60.818.000	29.867.820,00	49	51
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.625.000</b>	<b>10.625.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100,00	100,00	10.625.000	10.625.000,00	100,00	0
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	80	80,00	100,00	10.625.000	10.625.000,00	100,00	0
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>95</b>	<b>35,22</b>	<b>37,07</b>	<b>34.350.000</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>35,23</b>	<b>65</b>

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94	35,22	37,47	34.350.000	12.100.000,00	35,23	65
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	2	8,00	400,00	26.850.000	12.100.000,00	45,07	55
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1	-	-	7.500.000	-	-	100



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu</b>	102	M
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	82,43	M
				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	73,65	M
				<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	99,18	M
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	94,77	M
				<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	94,76	M
				<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	99,08	M
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	99,99	M
				<i>Koordinasi dan Penyusunan</i>	<i>Jumlah Dokumen</i>		

				<i>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik</i>		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		TM
				<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		TM
				<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>		TM
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	96,11	M
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	99,98	M
				<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	99,99	M
				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	96,60	M
				<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	100,00	M
				<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	84,00	M

				<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	99,43	M
				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	89,54	M
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</i>		M
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	91,86	M
				<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	74,67	M
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	77,72	M
				<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	93,10	M
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik</i>	80,84	M
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	72,77	M
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	100,00	M

				<i>Lainnya</i>	<i>yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>		
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	56,83	M
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat</b>		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatn Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		TM
				<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		TM
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	84,27	M
				<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	84,27	M
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat</b>		
					<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat <math>\geq</math></b>		

					<b>Rp. 20.000.000,-</b>		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	94,35	M
				<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	94,35	M
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	98,68	M
				<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	98,68	M
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	M

				<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100,00	M
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	88,50	M
				<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	85,29	M
				<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	100,00	M

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.826.590.775</b>	<b>1.263.573.114,00</b>	<b>69,18</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.100.000	2.749.990,00	24,77
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>7.400.000</i>	2.749.990,00	37,16
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3.700.000</i>	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.561.019.000	1.125.264.472,00	72,09
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>1.489.169.000</i>	<i>1.076.874.892,00</i>	<i>72,31</i>
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>68.850.000</i>	45.389.760,00	65,93
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>3.000.000</i>	2.999.820,00	99,99
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	-	-	
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.397.775	33.951.130,00	49,64
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>1.000.010</i>	514.700,00	51,47
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>2.000.000</i>	674.800,00	33,74
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>36.718.000</i>	17.050.000,00	46,43
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>4.879.765</i>	2.084.940,00	42,73
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-</i>	<i>2.000.000</i>	1.120.000,00	56,00

	<i>undangan</i>			
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	12.000.000	8.006.690,00	66,72
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	9.800.000	4.500.000,00	45,92
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.600.000	86.543.262,00	52,58
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.500.000	1.000.000,00	66,67
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	11.500.000	6.108.332,00	53,12
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	151.600.000	79.434.930,00	52,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.474.000	15.064.260,00	70,15
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	10.354.000	5.239.400,00	50,60
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	8.120.000	8.120.000,00	100,00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	3.000.000	1.704.860,00	56,83
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>61.300.000</b>	<b>18.547.100,00</b>	<b>30,26</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	61.300.000	18.547.100,00	30,26
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	61.300.000	18.547.100,00	30,26
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>53.100.000</b>	<b>36.899.710,00</b>	<b>69,49</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.100.000	36.899.710,00	69,49
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	53.100.000	36.899.710,00	69,49



	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>60.818.000</b>	<b>29.867.820,00</b>	<b>49,11</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.818.000	29.867.820,00	49,11
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	60.818.000	29.867.820,00	49
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10.625.000</b>	<b>10.625.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.625.000	10.625.000,00	100,00
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	10.625.000	10.625.000,00	100,00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>34.350.000</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>35,23</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.350.000	12.100.000,00	35,23
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	26.850.000	12.100.000,00	45,07
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	7.500.000	-	-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Kantor Kecamatan Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori ( **Baik**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sisa anggaran antara anggaran yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan DPA dan DPPA OPD Kecamatan Bulu Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.046.783.775,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **1.928.692.751,-** atau sebesar 94,23 % dan sisa anggaran adalah sebesar **Rp. 118.091.024,-** atau 5,77 %
2. permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2022 antara lain :
  - A. Belum terkoordinasinya secara maksimal beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
  - B. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.

- C. Belum optimalnya koordinasi intern OPD kami dalam melaksanakan tahapan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.
- D. Masih adanya dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa pada semua tatanan kehidupan demikian juga berdampak pada Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 pada OPD Kantor Kecamatan Bulu pada khususnya dan semua OPD se Kabupaten Rembang.

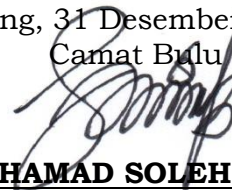
## 1.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengevaluasi Perencanaan
2. Melaksanakan bintek kemampuan dasar pegawai
3. Mensosialisasikan visi dan misi daerah dan OPD
4. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi internal kecamatan
5. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan

Demikian laporan kinerja instansi Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Bulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, 31 Desember 2022  
Camat Bulu .



**MOCHAMAD SOLEH SE MM**

Pembina

NIP. 19700505 199003 1008